

GREEN FINANCE AND SUSTAINABILITY PRACTICES IN ENCOURAGING ENVIRONMENTALLY-BASED TOURISM INVESTMENT IN BANYUWANGI

Green Finance dan Praktik Keberlanjutan dalam Mendorong Investasi Pariwisata Berbasis Lingkungan di Banyuwangi

Yovita Vivianty Indriadewi Atmadjaja^{1*}, Mahfud², Susintowati³

^{1,2,3} Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

¹yovitavia@untag-banyuwangi.ac.id

²mahfud@untagbanyuwangi.ac.id

³susintowati@yahoo.com

(*) Corresponding Author

yovitavia@untag-banyuwangi.ac.id

How to Cite: Yovita Vivianty Indriadewi Atmadjaja (2025). Green Finance dan Praktik Keberlanjutan dalam Mendorong Investasi Pariwisata Berbasis Lingkungan di Banyuwangi doi: 10.36526/js.v3i2.5357

<p>Received : 15-05-2025 Revised : 24-06-2025 Accepted: 25-06-2025</p> <p>Keywords: Sustainable Economic Growth, Environmentally Friendly Financing, Multisectoral Collaboration</p>	<p>Abstract Green Finance faces challenges in balancing economic growth and environmental preservation. Limited funding, low public understanding, and waste and cultural management are the main obstacles in the development of sustainable tourism. The objective of this research is to analyze the role of Green Finance in the development of sustainable tourism in Banyuwangi, with a focus on the challenges, potential, and strategies to overcome existing obstacles. The research methodology uses a relevant Systematic Literature Review (SLR) approach. Researchers identify relevant literature based on inclusion and exclusion criteria. Data analysis organizes information, looking for patterns or themes. Synthesis of findings illustrates patterns and relationships among different findings. The comprehensive conclusion includes benefits, challenges, and policy recommendations. The results of the Green Finance research support the development of the sustainable tourism sector, maintaining the balance between economic growth and environmental preservation. Sustainable financing encourages environmentally friendly projects, transforms development paradigms, and supports nature conservation. The conclusion of Green Finance supports the development of sustainable tourism by integrating environmental preservation and economic growth. The recommendation of this research is that collaboration between the government, society, and the private sector is necessary to address funding challenges and create adaptive and coordinated policies.</p>
---	---

PENDAHULUAN

Fenomena Green Finance semakin mendapatkan perhatian global dalam beberapa tahun terakhir. Green Finance berperan penting dalam mendorong pembangunan yang ramah lingkungan, termasuk sektor pariwisata yang semakin berorientasi pada keberlanjutan. Menurut Zhang et al. (2024), kebijakan Green Finance telah terbukti meningkatkan investasi di sektor yang mengedepankan pelestarian alam, salah satunya di industri pariwisata. Dalam konteks ini, Green Finance tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Shen et al. (2024) menambahkan bahwa kebijakan seperti Zona Percontohan Reformasi Green Finance di Tiongkok berhasil mendorong perkembangan proyek-proyek berkelanjutan, dan dapat diadaptasi di berbagai tempat dengan kondisi lokal yang berbeda.

Keberhasilan kebijakan tersebut dapat dilihat melalui implementasi proyek-proyek yang menggabungkan aspek lingkungan dengan sektor ekonomi. Fu et al. (2024) mengemukakan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu penerima manfaat dari penerapan Green Finance, di mana inisiatif seperti regenerasi ekosistem dan penerapan ekonomi sirkular dapat dijalankan. Selain itu, pariwisata berbasis lingkungan memberikan kontribusi positif bagi pelestarian alam, seperti yang

terlihat di Banyuwangi, Indonesia. Sumarmi et al. (2024) menunjukkan bahwa kolaborasi antara komunitas lokal dan pemerintah dalam pengelolaan hutan mangrove berkontribusi pada pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Hal ini menyoroti bagaimana Green Finance dapat mendorong praktek ramah lingkungan di sektor pariwisata.

Namun, di balik manfaatnya, implementasi Green Finance di sektor pariwisata juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah yang muncul adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pemerintah daerah harus berupaya menemukan kebijakan yang dapat menyeimbangkan kedua aspek ini agar tidak mengorbankan satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, program-program ekowisata yang berkembang pesat di Banyuwangi menghadapi tantangan dalam pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh peningkatan jumlah wisatawan. Sebagaimana yang ditemukan oleh Zhang et al. (2024), meskipun pariwisata hijau menawarkan peluang ekonomi, pengelolaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan alam yang tidak terkontrol.

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya ekonomi hijau menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan kebijakan keberlanjutan. Masyarakat lokal seringkali belum sepenuhnya menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam konteks pariwisata. Menurut Fu et al. (2024), keberhasilan kebijakan ekonomi hijau sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat setempat. Namun, masalah ini diperparah oleh kurangnya edukasi dan pelatihan tentang praktik-praktik ramah lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan menjadi sangat penting dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Masalah ketiga yang muncul dalam penerapan Green Finance di sektor pariwisata adalah keterbatasan pendanaan yang tersedia untuk mendukung proyek-proyek ramah lingkungan. Sebagai sektor yang masih berkembang, Green Finance memerlukan investasi yang cukup besar untuk memastikan keberlanjutannya. Shen et al. (2024) menyatakan bahwa meskipun kebijakan Green Finance telah memberikan dorongan positif, sektor swasta seringkali enggan berinvestasi tanpa adanya insentif yang jelas. Hal ini membuat pengembangan infrastruktur hijau dan proyek ekowisata di banyak daerah, termasuk Banyuwangi, terkendala oleh keterbatasan dana yang tersedia.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta memiliki potensi untuk mengatasi masalah pendanaan tersebut. Menurut Sumarmi et al. (2024), sinergi antara kedua sektor ini dapat menciptakan peluang investasi yang lebih besar dalam proyek-proyek keberlanjutan. Di Banyuwangi, kemitraan strategis antara pemerintah dan perusahaan swasta telah berhasil mengembangkan beberapa inisiatif ekowisata yang menarik wisatawan domestik dan internasional. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Zhang et al. (2024), adopsi teknologi ramah lingkungan di seluruh lokasi wisata masih belum merata, yang menunjukkan perlunya strategi yang lebih terfokus dalam mengatasi ketimpangan ini.

Pengelolaan limbah dan polusi menjadi salah satu isu utama yang dihadapi oleh destinasi wisata yang berkembang pesat, seperti Banyuwangi. Data menunjukkan bahwa jumlah wisatawan yang terus meningkat memberikan dampak langsung terhadap pengelolaan limbah yang tidak optimal. Hal ini memerlukan perhatian lebih dalam hal infrastruktur dan manajemen lingkungan. Shen et al. (2024) menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap tahapan pengembangan sektor pariwisata, termasuk pengelolaan limbah, konservasi sumber daya alam, dan pembangunan infrastruktur hijau.

Dalam konteks pengembangan ekowisata, program-program pelatihan bagi masyarakat lokal menjadi sangat penting. Melalui pelatihan ini, masyarakat tidak hanya memperoleh keterampilan untuk berpartisipasi aktif dalam pariwisata berkelanjutan, tetapi juga meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Menurut Fu et al. (2024), pendidikan masyarakat tentang ekonomi hijau dapat mempercepat transisi menuju praktik-praktik yang lebih ramah lingkungan. Namun, program-program pelatihan ini masih terbatas pada beberapa desa tertentu, sehingga perluasan jangkauannya menjadi tantangan tersendiri.

Adopsi teknologi ramah lingkungan oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) juga menghadapi hambatan yang signifikan. Biaya yang tinggi untuk mengimplementasikan teknologi hijau menjadi salah satu faktor penghambat utama. Oleh karena itu, dukungan pendanaan dari pemerintah dan lembaga keuangan sangat penting untuk membantu sektor UKM beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan. Zhang et al. (2024) menyatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan dalam implementasi ekonomi hijau adalah kemampuan sektor swasta untuk mengakses pendanaan yang cukup, terutama untuk perusahaan kecil yang tidak memiliki kapasitas finansial yang besar.

Selain itu, tekanan komersialisasi dalam sektor pariwisata sering kali bertentangan dengan upaya pelestarian budaya lokal. Dalam upaya menarik wisatawan, beberapa aspek budaya tradisional dapat terancam hilang atau terdistorsi. Fu et al. (2024) mengemukakan bahwa ekowisata dapat mendorong pelestarian budaya, namun tanpa pengelolaan yang hati-hati, komersialisasi pariwisata dapat menurunkan keaslian budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi pengelola destinasi wisata untuk mengembangkan kebijakan yang melibatkan masyarakat lokal dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata.

Green Finance memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Banyuwangi. Menurut Shen et al. (2024), kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat menciptakan solusi yang saling menguntungkan untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyuwangi memiliki peluang besar untuk menjadi model nasional dalam pariwisata berbasis Green Finance, dengan syarat ada komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mendukung implementasi kebijakan yang berkelanjutan.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi jangka panjang yang mencakup perencanaan yang matang, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, dan pengembangan infrastruktur hijau yang memadai. Zhang et al. (2024) mengungkapkan bahwa keberhasilan pariwisata berkelanjutan sangat bergantung pada kesadaran semua pihak untuk bekerja sama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, strategi yang lebih terkoordinasi dan terfokus sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pariwisata di Banyuwangi.

Pengembangan sektor pariwisata berbasis Green Finance di Banyuwangi menunjukkan bahwa keberlanjutan dalam pariwisata tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada peran aktif masyarakat dan sektor swasta. Sumarmi et al. (2024) menekankan bahwa keterlibatan semua pemangku kepentingan sangat penting dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang ramah lingkungan. Dengan pendekatan yang tepat, Banyuwangi dapat menjadi contoh sukses dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan yang dapat diikuti oleh daerah lain di Indonesia.

Keberhasilan Banyuwangi dalam mengembangkan pariwisata berbasis Green Finance dapat memberikan pelajaran berharga bagi daerah lain yang ingin menerapkan konsep serupa. Fu et al. (2024) menyatakan bahwa setiap daerah memiliki kondisi lokal yang unik, sehingga kebijakan dan strategi yang diterapkan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks lokal dan mengadaptasi kebijakan yang ada agar dapat memberikan hasil yang maksimal.

Secara keseluruhan, tantangan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Banyuwangi mencakup pengelolaan lingkungan, pendidikan masyarakat, pendanaan, dan keberlanjutan budaya. Namun, dengan pendekatan yang holistik dan partisipasi aktif dari semua pihak, tantangan ini dapat diatasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Shen et al.

METODELOGI

Metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) sangat relevan untuk menyusun kajian pustaka yang mendalam mengenai topik seperti Green Finance dan pariwisata berkelanjutan. Menurut Creswell dan Poth (2016), SLR adalah metode yang digunakan untuk menyaring dan menganalisis literatur yang relevan untuk mengidentifikasi tren, kekuatan, dan kelemahan dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Proses ini melibatkan identifikasi sumber-sumber terpercaya, seperti jurnal dan dokumen penelitian, untuk mengumpulkan

data yang akan dianalisis secara sistematis. SLR juga bertujuan untuk menyusun kesimpulan dari literatur yang ada, yang memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana topik tersebut telah dikembangkan dalam literatur dan bagaimana pengaruhnya terhadap bidang studi terkait.

Dalam penelitian ini, langkah pertama adalah mengidentifikasi artikel-artikel yang relevan mengenai Green Finance dan sektor pariwisata berkelanjutan. Menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi yang ditetapkan sebelumnya, artikel-artikel yang mengkaji kebijakan Green Finance dalam konteks pariwisata berkelanjutan akan dipilih untuk dianalisis. Creswell dan Poth (2016) menekankan bahwa penting untuk melakukan seleksi literatur yang cermat guna memastikan bahwa artikel yang digunakan memiliki kualitas yang tinggi dan relevansi yang jelas dengan fokus penelitian. Dengan meneliti jurnal-jurnal akademis dan dokumen-dokumen penelitian terkait, peneliti dapat membangun dasar yang kuat untuk pemahaman topik yang lebih luas.

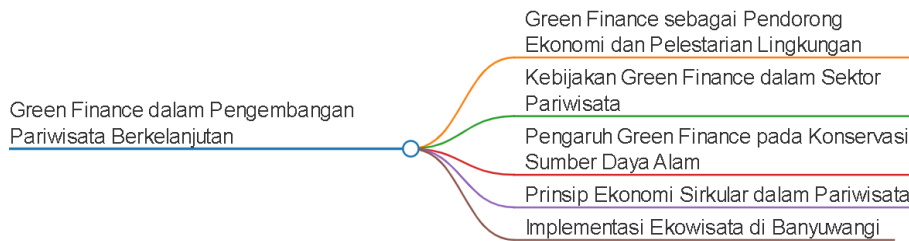
Analisis data dalam SLR dilakukan dengan mengorganisasi informasi yang diperoleh dari artikel-artikel yang telah dipilih. Creswell dan Poth (2016) menyatakan bahwa dalam analisis kualitatif, penting untuk mencari pola dan tema yang muncul dari data. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menyimpulkan bagaimana topik tersebut telah dibahas dan apakah ada kesenjangan yang perlu dijelajahi lebih lanjut. Dalam hal ini, peneliti akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Green Finance di sektor pariwisata, termasuk tantangan dalam pendanaan, kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat. Temuan dari analisis ini juga dapat membantu mengungkapkan kontribusi dan peran penting Green Finance dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dalam sektor pariwisata.

Langkah selanjutnya adalah sintesis dari temuan yang ditemukan dalam artikel-artikel yang telah dianalisis. Sintesis data dalam penelitian kualitatif SLR memungkinkan peneliti untuk menggambarkan pola-pola yang muncul dan membuat hubungan antara temuan-temuan yang berbeda. Sebagai contoh, Shen et al. (2024) menunjukkan bahwa kebijakan Green Finance di Tiongkok berhasil meningkatkan proyek-proyek berkelanjutan di sektor pariwisata. Sumber lain, seperti Fu et al. (2024), menambahkan bahwa sektor pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia, khususnya di Banyuwangi, telah memperoleh manfaat dari penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau. Sintesis ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana kebijakan Green Finance dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks yang berbeda, serta memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam sektor pariwisata berkelanjutan.

Akhirnya, hasil analisis SLR akan dikompilasikan dan disimpulkan dalam bentuk laporan yang komprehensif. Creswell dan Poth (2016) menekankan bahwa sintesis ini harus menggabungkan temuan-temuan utama dari penelitian terdahulu, serta memberikan rekomendasi untuk penelitian dan kebijakan selanjutnya. Peneliti akan menggali kesimpulan yang dapat diperoleh dari literatur yang ada, termasuk manfaat dan tantangan dari implementasi Green Finance di sektor pariwisata berkelanjutan. Dalam hal ini, peneliti dapat menawarkan wawasan mengenai bagaimana pengelolaan Green Finance dapat memperbaiki keberlanjutan lingkungan dan ekonomi dalam sektor pariwisata, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut dalam penelitian di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Green Finance telah menjadi pendorong utama dalam pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan, dengan tujuan utama untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Menurut Zhang et al. (2024), Green Finance tidak hanya mengarah pada peningkatan investasi pada sektor-sektor yang mendukung kelestarian alam, tetapi juga menyediakan platform bagi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan ini telah terbukti berperan signifikan dalam sektor pariwisata, di mana pembiayaan yang berkelanjutan memberi dorongan bagi pelaksanaan proyek-proyek yang ramah lingkungan. Kebijakan Green Finance, sebagaimana dinyatakan oleh Shen et al. (2024), mampu mengubah paradigma pembangunan melalui implementasi model reformasi yang dapat disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing wilayah.

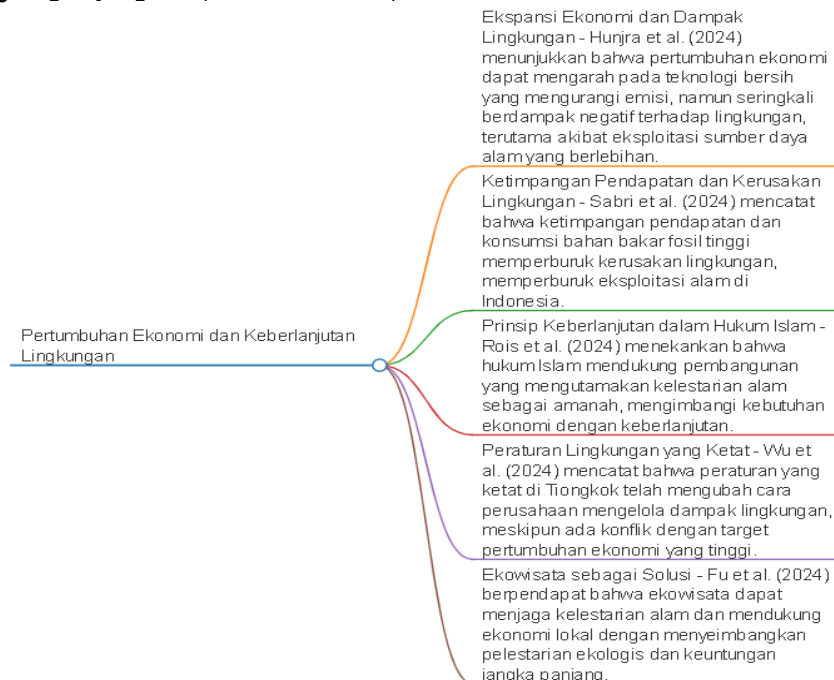


Gambar 1. Green Finance dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Sektor pariwisata yang berorientasi pada keberlanjutan semakin mendapat perhatian karena kemampuannya mendukung konservasi sumber daya alam serta memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah. Fu et al. (2024) menyatakan bahwa sektor ini tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, tetapi juga mengintegrasikan prinsip ekonomi sirkular dalam pengelolaannya. Keberlanjutan dalam sektor pariwisata mendorong praktik regenerasi ekosistem yang dapat menguntungkan baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Hal ini terlihat dari inisiatif yang telah diterapkan di beberapa daerah, seperti Banyuwangi, yang mengadopsi ekowisata sebagai model pengelolaan alam yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, sektor ini berpotensi besar dalam menjadi motor penggerak ekonomi hijau yang progresif.

Ketidakseimbangan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan

Fenomena yang semakin berkembang di negara-negara berkembang adalah ketegangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Hunjra et al. (2024) mengemukakan bahwa ekspansi ekonomi dapat mendorong penggunaan teknologi yang lebih bersih, yang pada gilirannya mengurangi emisi dan kerusakan lingkungan. Namun, mereka juga menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi sering kali memperburuk kondisi lingkungan, terutama ketika didorong oleh investasi langsung asing yang tidak terkelola dengan baik dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Di Indonesia, kerusakan lingkungan berhubungan erat dengan faktor-faktor seperti ketimpangan pendapatan dan konsumsi bahan bakar fosil yang tinggi, yang semakin memperburuk masalah lingkungan yang ada (Sabri et al., 2024).



Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi dan Keberlanjutan Lingkungan

Pemerintah di negara-negara berkembang seringkali menghadapi dilema dalam menetapkan kebijakan yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi sementara tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks Indonesia, ketergantungan pada sektor ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan sering kali memicu kerusakan lingkungan yang parah. Sabri et al. (2024) mencatat bahwa ketimpangan pendapatan dan distribusi sumber daya yang tidak merata memperburuk eksploitasi lingkungan, karena komunitas-komunitas lokal yang terpinggirkan seringkali tidak memiliki akses ke kebijakan yang lebih berkelanjutan. Kondisi ini menuntut kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada prinsip-prinsip keberlanjutan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak merugikan lingkungan.

Seiring dengan perkembangan ekonomi yang cepat, tantangan utama adalah bagaimana mengelola sumber daya alam yang terbatas dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan. Rois et al. (2024) dalam perspektif hukum Islam menekankan bahwa pelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan pemerintah. Hukum Islam mendukung kebijakan pembangunan yang tidak hanya mementingkan keuntungan ekonomi tetapi juga kelestarian alam sebagai bagian dari amanah kepada Tuhan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip keberlanjutan ini seharusnya diterapkan dalam setiap langkah kebijakan pemerintah, mengingat dampak jangka panjang terhadap generasi mendatang.

Tiongkok memberikan contoh bagaimana peraturan lingkungan yang lebih ketat dapat mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan. Wu et al. (2024) mencatat bahwa peraturan yang lebih ketat telah menciptakan perubahan dalam cara perusahaan mengelola dampak lingkungan mereka. Namun, tantangan muncul ketika tujuan pertumbuhan ekonomi yang tinggi bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan. Perusahaan-perusahaan milik negara dan perusahaan besar yang sangat mencemari sering kali mengabaikan peraturan yang ada untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih tegas dan terintegrasi untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak menghancurkan keberlanjutan lingkungan.

Fenomena serupa juga terjadi dalam sektor pariwisata, di mana pertumbuhan sektor ini dapat membawa dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Zhang et al. (2024) mengungkapkan bahwa pengelolaan sektor pariwisata yang buruk dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Sebagai contoh, di Banyuwangi, Indonesia, peningkatan jumlah wisatawan yang pesat berisiko terhadap degradasi lingkungan, seperti kerusakan hutan mangrove dan pencemaran air. Sektor pariwisata, yang seharusnya menjadi pendorong ekonomi yang berkelanjutan, seringkali menyebabkan kerusakan alam jika tidak dikelola dengan bijaksana. Hal ini menekankan pentingnya pengelolaan yang tepat untuk menyeimbangkan manfaat ekonomi pariwisata dengan kelestarian lingkungan.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan dalam menghadapi masalah ini adalah dengan mengembangkan ekowisata yang berbasis pada keberlanjutan. Fu et al. (2024) berpendapat bahwa ekowisata dapat menjadi strategi efektif untuk menjaga kelestarian alam sekaligus mendukung perekonomian lokal. Ekowisata tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada upaya menjaga keseimbangan ekologis yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Inisiatif ini mengarah pada pengembangan proyek-proyek yang mempromosikan pelestarian alam dan pengurangan jejak karbon, yang pada gilirannya dapat menarik wisatawan yang peduli dengan keberlanjutan lingkungan.

Penerapan ekowisata di Banyuwangi menunjukkan bagaimana pengelolaan pariwisata yang berbasis pada keberlanjutan dapat menciptakan win-win solution antara ekonomi dan lingkungan. Shen et al. (2024) menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang berbasis pada analisis dampak lingkungan yang menyeluruh dalam merancang proyek-proyek pariwisata. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menetapkan batasan pada jumlah wisatawan yang dapat mengunjungi destinasi tertentu, agar lingkungan tidak mengalami tekanan yang berlebihan.

Penetapan batasan ini akan membantu menjaga keberlanjutan alam sambil memastikan bahwa sektor pariwisata tetap dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan.

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan kebijakan pariwisata yang berkelanjutan. Pemerintah harus bekerja sama dengan pelaku sektor swasta dalam mengembangkan infrastruktur hijau yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Selain itu, partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa keberlanjutan lingkungan dapat terjaga. Zhang et al. (2024) mengungkapkan bahwa sektor swasta sering kali enggan berinvestasi dalam infrastruktur hijau tanpa adanya insentif yang jelas, oleh karena itu kebijakan pendanaan yang memadai perlu diperkenalkan untuk mendorong partisipasi sektor swasta.

Pengelolaan yang efisien terhadap sumber daya alam, seperti hutan dan air, menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Fu et al. (2024) menekankan bahwa pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam konteks pariwisata, sumber daya alam seperti hutan mangrove, pantai, dan terumbu karang perlu dikelola secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa mereka tetap menjadi daya tarik wisata yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, pemerintah harus memperkenalkan kebijakan yang tidak hanya fokus pada pendapatan, tetapi juga pada konservasi sumber daya alam.

Namun, meskipun ada berbagai kebijakan yang dapat membantu mengatasi masalah ini, tantangan terbesar adalah bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut di tingkat lokal. Shen et al. (2024) menyarankan agar pemerintah daerah mengadopsi kebijakan yang lebih spesifik dan terlokalisasi, mengingat setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Kebijakan yang diterapkan di Banyuwangi, misalnya, harus disesuaikan dengan karakteristik lingkungan dan sosial-ekonomi daerah tersebut, agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan yang ada untuk memiliki fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian terhadap kebutuhan lokal.

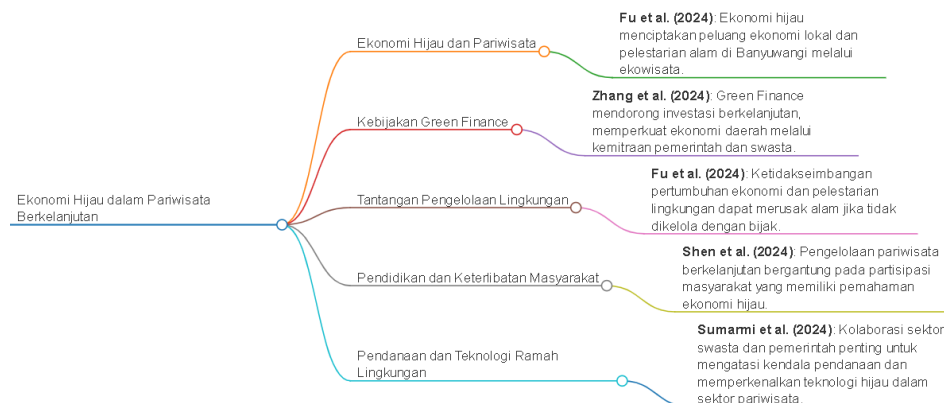
Keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi hijau juga sangat bergantung pada dukungan dari sektor swasta dan masyarakat. Sumarmi et al. (2024) berpendapat bahwa sektor swasta memiliki peran yang penting dalam mendorong investasi dalam infrastruktur hijau dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dalam hal ini, kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dapat menciptakan peluang investasi yang lebih besar untuk mendukung kebijakan ekonomi hijau. Namun, sektor swasta juga harus menyadari bahwa investasi dalam keberlanjutan akan memberikan keuntungan jangka panjang yang lebih besar, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan.

Tantangan selanjutnya adalah meningkatkan kapasitas masyarakat lokal agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Fu et al. (2024) mencatat bahwa pendidikan dan pelatihan tentang ekonomi hijau sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan. Program-program pelatihan yang relevan dapat membantu masyarakat memahami bagaimana mereka dapat mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan ikut serta dalam usaha pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan masyarakat menjadi komponen penting dalam membentuk budaya keberlanjutan yang mendalam dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, pengelolaan sektor pariwisata berkelanjutan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada peran aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta. Zhang et al. (2024) menyarankan bahwa kolaborasi antara ketiga pihak ini dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan sektor pariwisata. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan yang diterapkan untuk tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi.

Rendahnya Pemahaman Masyarakat Tentang Ekonomi Hijau

Penerapan ekonomi hijau di sektor pariwisata menjadi salah satu isu penting dalam upaya mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Salah satu daerah yang sedang mengembangkan konsep ini adalah Banyuwangi, yang dikenal dengan berbagai potensi alamnya yang menarik wisatawan. Menurut Fu et al. (2024), ekonomi hijau dalam sektor pariwisata tidak hanya berfokus pada pelestarian alam, tetapi juga menciptakan peluang bagi ekonomi lokal. Dalam konteks ini, Banyuwangi menjadi model yang menarik, karena mengembangkan ekowisata sebagai strategi utama untuk menarik wisatawan sembari melindungi lingkungan sekitar.



Gambar 4. Ekonomi Hijau dalam Pariwisata Berkelanjutan

Sektor pariwisata di Banyuwangi berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan baik domestik maupun internasional. Zhang et al. (2024) mencatat bahwa kebijakan Green Finance dalam sektor pariwisata di Banyuwangi terbukti mampu meningkatkan kontribusi ekonomi daerah melalui investasi berkelanjutan. Keberhasilan ini sebagian besar disebabkan oleh kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam menerapkan program-program yang ramah lingkungan. Namun, seiring dengan pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata, tantangan besar muncul, terutama terkait dengan pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh peningkatan jumlah wisatawan.

Menurut Fu et al. (2024), salah satu tantangan utama dalam menerapkan ekonomi hijau di sektor pariwisata adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Peningkatan jumlah wisatawan, meskipun memberikan dampak positif pada perekonomian lokal, dapat menyebabkan kerusakan alam yang tidak terkendali jika tidak dikelola dengan baik. Di Banyuwangi, sebagai contoh, pengelolaan hutan mangrove dan kawasan konservasi alam lainnya menghadapi tantangan besar. Zhang et al. (2024) mengemukakan bahwa, meskipun kebijakan Green Finance mendukung sektor pariwisata yang berkelanjutan, kesadaran yang kurang terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dapat menyebabkan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.

Shen et al. (2024) menambahkan bahwa pengelolaan wisata berkelanjutan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat lokal. Hal ini tercermin dalam pengelolaan ekowisata yang lebih baik ketika masyarakat memiliki pemahaman yang kuat mengenai ekonomi hijau dan pentingnya menjaga kelestarian alam. Namun, masalah besar yang dihadapi adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi hijau, yang berhubungan langsung dengan pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif dalam melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sangat penting.

Seiring dengan rendahnya kesadaran masyarakat, salah satu hambatan utama adalah kurangnya akses terhadap pendidikan yang relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau. Fu et al. (2024) menekankan bahwa program pelatihan dan edukasi untuk masyarakat harus menjadi prioritas

utama dalam implementasi kebijakan keberlanjutan. Pendidikan ini tidak hanya mencakup teori ekonomi hijau, tetapi juga melibatkan keterampilan praktis dalam pengelolaan sampah, pelestarian alam, dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan sehari-hari. Tanpa adanya peningkatan kapasitas ini, transisi menuju ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan akan terhambat.

Program pelatihan yang diadakan di Banyuwangi, meskipun sudah ada, masih terbatas pada beberapa desa tertentu. Shen et al. (2024) menyarankan bahwa perluasan jangkauan program edukasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam ekonomi hijau. Selain itu, upaya ini harus didukung oleh kebijakan yang mendukung akses masyarakat terhadap sumber daya pendidikan yang memadai, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam mendukung pariwisata berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat, penyebaran pengetahuan tentang ekonomi hijau dapat lebih efektif.

Selain masalah kesadaran masyarakat, keterbatasan pendanaan juga menjadi hambatan besar dalam penerapan ekonomi hijau di sektor pariwisata. Shen et al. (2024) mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan Green Finance mampu mendorong investasi di sektor pariwisata, sektor swasta sering kali enggan berinvestasi dalam proyek-proyek berkelanjutan tanpa adanya insentif yang jelas. Di Banyuwangi, beberapa proyek ekowisata dan pembangunan infrastruktur hijau terhambat oleh keterbatasan dana yang tersedia. Pendanaan yang cukup diperlukan untuk membiayai proyek-proyek yang dapat meningkatkan kualitas pariwisata sambil menjaga kelestarian lingkungan.

Sumarmi et al. (2024) menunjukkan bahwa kolaborasi antara sektor pemerintah dan swasta dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah pendanaan ini. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan insentif atau kemudahan dalam mendapatkan akses pendanaan bagi proyek-proyek berkelanjutan, sementara sektor swasta dapat berperan dalam menyediakan modal dan teknologi ramah lingkungan. Di Banyuwangi, kemitraan ini telah membuahkan hasil dalam mengembangkan sejumlah proyek ekowisata yang menarik wisatawan. Namun, tantangan pendanaan yang terbatas tetap menjadi masalah yang perlu diatasi agar pengembangan pariwisata berkelanjutan dapat lebih maksimal.

Masalah pendanaan juga terkait erat dengan tingkat pengembangan ekonomi hijau yang masih terbatas di negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebuah analisis bibliometrik oleh Hamzah E. Alqudah et al. (2024) mengungkapkan bahwa meskipun bidang ekonomi hijau semakin penting, penelitian dan implementasi kebijakan terkait masih dalam tahap awal. Di Indonesia, khususnya di Banyuwangi, pendanaan yang terbatas menjadi salah satu kendala terbesar dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi hijau secara optimal. Oleh karena itu, pencarian solusi yang lebih inovatif dalam pendanaan sangat penting untuk mendukung proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan.

Keterbatasan pendanaan juga sering kali dipengaruhi oleh ketidakpastian dalam hasil yang dapat diperoleh dari proyek-proyek ekowisata. Sebagai contoh, Fu et al. (2024) mencatat bahwa investasi dalam teknologi ramah lingkungan sering kali memerlukan biaya yang tinggi, sementara hasil dari investasi ini mungkin tidak langsung terlihat dalam jangka pendek. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan jaminan dan dukungan bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Banyuwangi. Tanpa dukungan yang memadai, sektor swasta mungkin enggan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek berisiko tinggi tersebut.

Selain itu, tantangan lain dalam penerapan ekonomi hijau di sektor pariwisata adalah pengelolaan sampah dan polusi yang ditimbulkan oleh pariwisata massal. Zhang et al. (2024) mencatat bahwa destinasi wisata yang berkembang pesat, seperti Banyuwangi, sering kali mengalami masalah pengelolaan limbah yang tidak optimal. Kenaikan jumlah wisatawan, tanpa diimbangi dengan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terkoordinasi dalam mengelola sampah dan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan pariwisata.

Shen et al. (2024) menekankan pentingnya pendekatan berbasis prinsip keberlanjutan dalam setiap tahap pengembangan sektor pariwisata, termasuk dalam pengelolaan sampah dan limbah. Salah satu solusi yang dapat diterapkan di Banyuwangi adalah pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat, di mana masyarakat setempat dilibatkan dalam pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah. Program-program pelatihan terkait pengelolaan sampah yang ramah lingkungan harus diperluas agar masyarakat dapat memiliki peran aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar destinasi wisata.

Di sisi lain, teknologi ramah lingkungan menjadi faktor kunci dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Zhang et al. (2024) menyarankan bahwa teknologi yang efisien dalam mengelola sumber daya alam dan mengurangi dampak lingkungan perlu diterapkan secara luas. Namun, penerapan teknologi ramah lingkungan di sektor pariwisata seringkali terkendala oleh biaya yang tinggi dan keterbatasan akses terhadap teknologi tersebut, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang terlibat dalam sektor pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat mendukung UKM untuk mengadopsi teknologi hijau yang lebih ramah lingkungan.

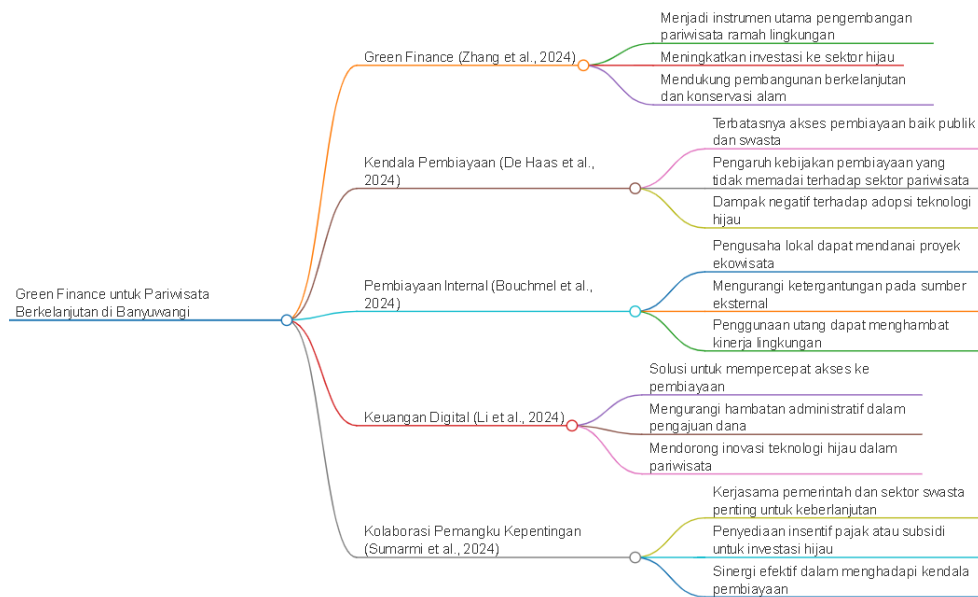
Selain tantangan ekonomi dan pengelolaan lingkungan, komersialisasi dalam sektor pariwisata juga dapat berkonflik dengan pelestarian budaya lokal. Fu et al. (2024) menyatakan bahwa meskipun ekowisata dapat mendukung pelestarian budaya, komersialisasi yang berlebihan sering kali dapat mengancam keaslian budaya lokal. Di Banyuwangi, ada potensi bahwa upaya menarik wisatawan dapat menyebabkan hilangnya atau distorsi terhadap budaya tradisional. Oleh karena itu, pengelola destinasi wisata harus memastikan bahwa pelestarian budaya lokal tetap menjadi prioritas, bahkan dalam upaya meningkatkan daya tarik wisata.

Dalam mengatasi tantangan tersebut, pendekatan yang lebih inklusif dan holistik diperlukan. Hamzah E. Alqudah et al. (2024) menyarankan bahwa ekonomi hijau harus dipandang sebagai solusi yang saling terkait antara ekonomi, lingkungan, dan budaya. Penerapan kebijakan yang menyelaraskan ketiga aspek ini akan menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan lembaga pendidikan sangat penting dalam mewujudkan tujuan ini.

Akhirnya, meskipun tantangan dalam penerapan ekonomi hijau di sektor pariwisata masih besar, potensi besar untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan di Banyuwangi tetap terbuka lebar. Dengan pendekatan yang tepat dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, Banyuwangi dapat menjadi contoh sukses dalam mengintegrasikan ekonomi hijau ke dalam pengembangan sektor pariwisata. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Zhang et al. (2024), keberlanjutan sektor pariwisata memerlukan kebijakan yang adaptif dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait.

Keterbatasan Pendanaan dalam Green Finance

Green Finance telah menjadi salah satu instrumen yang menjanjikan dalam mengembangkan sektor pariwisata berkelanjutan, khususnya di Banyuwangi. Zhang et al. (2024) menunjukkan bahwa kebijakan Green Finance tidak hanya meningkatkan aliran investasi ke sektor yang ramah lingkungan, tetapi juga berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Sektor pariwisata Banyuwangi, yang terkenal akan ekosistem alamnya yang luar biasa, mendapat manfaat langsung dari kebijakan ini melalui penerapan proyek ekowisata. Salah satu contoh nyata adalah kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mendanai proyek-proyek yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan, seperti konservasi hutan mangrove dan pengelolaan taman nasional. Oleh karena itu, pembiayaan hijau berpotensi menjadi kunci sukses dalam mengembangkan pariwisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga menjaga kelestarian alam.



Gambar 5. Green Finance untuk Pariwisata Berkelanjutan di Banyuwangi

Namun, implementasi kebijakan Green Finance di Banyuwangi tidak lepas dari tantangan besar, terutama terkait dengan kendala pembiayaan. De Haas et al. (2024) menemukan bahwa keterbatasan pembiayaan, baik yang bersumber dari sektor swasta maupun publik, menjadi salah satu hambatan utama dalam mendukung investasi hijau. Keterbatasan kredit, yang dipengaruhi oleh kebijakan pembiayaan yang tidak memadai, seringkali menghambat perusahaan, termasuk sektor pariwisata, untuk mengadopsi teknologi hijau yang diperlukan dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini menjadi masalah signifikan, karena teknologi hijau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pariwisata terhadap alam. Tanpa adanya pembiayaan yang memadai, sektor pariwisata di Banyuwangi berisiko mengalami kerusakan lingkungan yang dapat mengurangi daya tariknya sebagai destinasi wisata.

Dalam menghadapi kendala pembiayaan, Bouchmel et al. (2024) mengungkapkan bahwa pembiayaan internal memiliki dampak positif terhadap investasi hijau. Hal ini dapat dipahami dalam konteks sektor pariwisata, di mana banyak pengusaha lokal yang dapat mendanai proyek-proyek ekowisata dengan sumber daya internal mereka, meskipun dana yang dibutuhkan seringkali lebih besar dari kemampuan mereka. Pendanaan internal ini dapat mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal yang lebih sulit diakses, namun tetap memberikan ruang bagi keberlanjutan proyek-proyek tersebut. Akan tetapi, Bouchmel et al. (2024) juga menunjukkan bahwa penggunaan utang seringkali berkorelasi negatif dengan kinerja lingkungan, karena proyek yang dibiayai utang sering kali lebih terbebani oleh kewajiban finansial yang membatasi kemampuan untuk berinvestasi dalam infrastruktur ramah lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan mekanisme pendanaan yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Keterbatasan pembiayaan yang signifikan juga mencakup kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menyediakan dana untuk proyek-proyek keberlanjutan. Li et al. (2024) berpendapat bahwa keuangan digital dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi kendala pembiayaan, serta mendorong inovasi dalam teknologi hijau. Pembiayaan berbasis digital menawarkan cara yang lebih efisien dan transparan untuk mengalokasikan dana, memudahkan sektor swasta dan publik untuk mengakses sumber daya yang dibutuhkan dalam mendanai proyek-proyek keberlanjutan. Keuangan digital juga dapat membantu mengurangi hambatan yang seringkali muncul dalam proses pengajuan pembiayaan konvensional, terutama yang terkait dengan persyaratan administratif yang rumit. Dalam konteks Banyuwangi, pemanfaatan keuangan digital dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan, yang membutuhkan akses cepat ke pembiayaan untuk mengimplementasikan berbagai proyek ramah lingkungan.

Chen et al. (2024) menekankan bahwa kebijakan Green Finance juga memiliki peran besar dalam mengatasi kendala pembiayaan di kota-kota yang kekurangan sumber daya. Melalui kebijakan seperti insentif pajak dan perhatian yang lebih besar dari analisis pasar, sektor swasta akan lebih terdorong untuk berinvestasi dalam proyek yang mendukung keberlanjutan. Keuntungan yang diberikan oleh kebijakan tersebut sangat berpotensi mengurangi risiko finansial yang selama ini menghalangi pengusaha di Banyuwangi untuk berinvestasi dalam teknologi hijau dan infrastruktur yang ramah lingkungan. Insentif semacam ini dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk mengalokasikan dana mereka dalam proyek-proyek yang berfokus pada pelestarian alam, sekaligus meningkatkan daya tarik Banyuwangi sebagai destinasi ekowisata yang berkelanjutan.

Sektor swasta di Banyuwangi, meskipun memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata berbasis Green Finance, sering kali enggan berinvestasi tanpa adanya insentif yang jelas. Shen et al. (2024) mengungkapkan bahwa investasi dalam sektor pariwisata hijau memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan dukungan melalui kebijakan yang mendukung sektor swasta. Melalui kerjasama yang erat antara pemerintah dan sektor swasta, peluang investasi dalam proyek-proyek berkelanjutan dapat lebih dimaksimalkan. Kolaborasi ini juga bisa membantu dalam mengatasi masalah pendanaan yang terbatas, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pendanaan eksternal yang sering kali sulit dijangkau oleh sektor pariwisata di daerah-daerah seperti Banyuwangi.

Sumarmi et al. (2024) menyarankan bahwa sinergi antara sektor publik dan sektor swasta akan menciptakan solusi yang lebih efektif untuk menghadapi kendala pendanaan di sektor pariwisata. Sebagai contoh, pemerintah dapat menawarkan insentif berupa pengurangan pajak atau subsidi bagi perusahaan yang berinvestasi dalam proyek-proyek ramah lingkungan. Di sisi lain, sektor swasta dapat menyediakan modal dan teknologi yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek-proyek keberlanjutan ini. Kerjasama yang baik antara kedua pihak ini akan memastikan bahwa pendanaan dapat dialokasikan secara lebih efisien dan efektif, sehingga proyek-proyek ekowisata dan infrastruktur hijau dapat terwujud di Banyuwangi.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Banyuwangi dalam menerapkan Green Finance adalah peningkatan permintaan wisatawan yang dapat menyebabkan tekanan terhadap sumber daya alam. Zhang et al. (2024) menunjukkan bahwa meskipun Green Finance dapat mendorong pengembangan sektor pariwisata, tanpa pengelolaan yang baik, sektor ini bisa berisiko mengalami kerusakan lingkungan yang signifikan. Dalam kasus Banyuwangi, salah satu contoh tantangan ini adalah peningkatan jumlah wisatawan yang terus berkembang. Tanpa pengelolaan yang tepat, dampak negatif dari wisata massal, seperti polusi dan kerusakan alam, dapat merusak daya tarik wisata itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi Banyuwangi untuk mengembangkan kebijakan yang berfokus pada pengelolaan wisata yang ramah lingkungan.

Seiring berkembangnya pariwisata di Banyuwangi, pengelolaan limbah menjadi isu yang semakin mendesak. Shen et al. (2024) menggarisbawahi bahwa sektor pariwisata yang berkembang pesat harus memiliki sistem pengelolaan limbah yang efektif untuk mengurangi dampak lingkungan. Peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Banyuwangi membawa serta volume sampah dan polusi yang lebih besar. Oleh karena itu, pengelolaan limbah yang baik, serta penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengembangan pariwisata, harus menjadi prioritas utama. Dengan pendekatan yang terencana dan berbasis pada kebijakan Green Finance, Banyuwangi dapat menjaga kelestarian lingkungan sambil terus berkembang sebagai destinasi pariwisata yang menarik.

Program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat lokal merupakan aspek penting dalam menciptakan kesadaran tentang pentingnya ekonomi hijau dalam sektor pariwisata. Fu et al. (2024) menekankan bahwa tanpa keterlibatan aktif masyarakat, keberhasilan kebijakan Green Finance tidak akan optimal. Pendidikan tentang pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan akan membantu masyarakat lokal memahami peran mereka dalam menjaga kelestarian alam. Dalam konteks Banyuwangi, masyarakat lokal harus dilibatkan dalam setiap tahap pengembangan pariwisata

berkelanjutan, agar mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga keaslian dan kelestarian lingkungan.

Selain itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan di Banyuwangi menjadi kunci dalam mencapai keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis Green Finance. Sumarmi et al. (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih ramah lingkungan. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus dapat menyediakan kerangka kerja yang mendukung semua pihak yang terlibat, sementara sektor swasta dapat berperan dalam menyediakan dana dan teknologi yang dibutuhkan. Dengan kerjasama yang solid, tantangan dalam pengelolaan pariwisata hijau dapat diatasi secara lebih efektif.

Keberhasilan Banyuwangi dalam menerapkan kebijakan Green Finance memberikan contoh positif bagi daerah lain yang ingin mengembangkan sektor pariwisata berkelanjutan. Sebagaimana dicontohkan oleh Shen et al. (2024), proyek ekowisata yang berhasil di Banyuwangi menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta dapat menciptakan model pembangunan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi Banyuwangi untuk terus memperkuat kerjasama ini, agar sektor pariwisata dapat berkembang seiring dengan upaya pelestarian alam.

Akhirnya, Banyuwangi memiliki potensi besar untuk menjadi contoh unggul dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui Green Finance. Zhang et al. (2024) menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Green Finance sangat bergantung pada adanya kebijakan yang mendukung, pengelolaan yang efisien, dan keterlibatan aktif semua pihak. Dengan memanfaatkan kebijakan yang tepat dan memastikan keterlibatan semua pihak, Banyuwangi dapat menciptakan sektor pariwisata yang berkelanjutan, yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian alam.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Green Finance memiliki peran krusial dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Penerapan kebijakan Green Finance dapat menciptakan hubungan yang menguntungkan antara pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata. Namun, tantangan besar dalam implementasi Green Finance tetap ada, terutama terkait ketidakseimbangan antara tujuan ekonomi dan lingkungan. Seringkali, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ekonomi hijau menjadi kendala signifikan dalam menjalankan proyek-proyek ramah lingkungan. Selain itu, keterbatasan dana menjadi masalah utama yang menghambat pembiayaan proyek-proyek pariwisata hijau, sehingga mengurangi potensi keberlanjutan dalam jangka panjang.

Penelitian ini merekomendasikan adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengatasi tantangan Green Finance. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang adaptif dan terkoordinasi untuk memastikan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang ramah lingkungan. Selain itu, program edukasi masyarakat mengenai pentingnya ekonomi hijau perlu diperkuat agar pemahaman tentang keberlanjutan semakin meluas. Pengembangan mekanisme pendanaan yang lebih inklusif dan efisien dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya finansial dalam mendukung proyek-proyek ramah lingkungan. Penelitian ini menyarankan bahwa penciptaan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan memerlukan kerjasama dari semua pihak yang terlibat, guna menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan alam.

DAFTAR PUSTAKA

Alqudah, H., Al-Qudah, M., Huson, Y. A., Lutfi, A., Alrawd, M., & Almaiah, M. A. (2024). A decade of green economic literature: An analysis-based bibliometric. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 497–511. doi:10.32479/ijeep.15579

- BACHRI, S., MUTIA, T., SHOLEHA, A. W., RAHMASYAH, P. I., & SHRESTHA, R. P. (2024). MANGROVE FOREST MANAGEMENT STRATEGY IN BEDUL, BANYUWANGI: COLLABORATION BETWEEN COMMUNITY AND ALAS PURWO NATIONAL PARK FOR SUSTAINABLE ECOTOURISM DEVELOPMENT. *GeoJournal of Tourism & Geosites*, 52(1). doi:10.30892/gtg.52108-1185
- Bouchmel, I., Ftiti, Z., Louhich, W., & Omri, A. (2024). Financing sources, green investment, and environmental performance: Cross-country evidence. *Journal of Environmental Management*, 353(120230), 120230. doi:10.1016/j.jenvman.2024.120230
- Chen, H., Wu, H., Zhang, L., Tang, Y., & Lu, S. (2024). Does green financial policy promote the transformation of resource-exhausted cities? - Evidence from the micro level. *Resources Policy*, 88(104500), 104500. doi:10.1016/j.resourpol.2023.104500
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- De Haas, R., Martin, R., Muûls, M., & Schweiger, H. (2024). Managerial and financial barriers to the Green transition. *Management Science*. doi:10.1287/mnsc.2023.00772
- Fu, M., Huang, S., & Ahmed, S. (2024). Assessing the impact of green finance on sustainable tourism development in China. *Heliyon*, 10(10), e31099. doi:10.1016/j.heliyon.2024.e31099
- Hidayat, A., Abbas, A. S., & Wafa, M. A. (2024). PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK BANK SYARIAH DI DESA PATROL BARU KECAMATAN PATROL KABUPATEN INDRAMAYU. *Journal of Islamic Studies*, 2(3), 275–284. doi:10.61341/jis/v2i3.054
- Hunjra, A. I., Bouri, E., Azam, M., Azam, R. I., & Dai, J. (2024). Economic growth and environmental sustainability in developing economies. *Research in International Business and Finance*, 70(102341), 102341. doi:10.1016/j.ribaf.2024.102341
- Li, B., Liu, Z., Jia, X., & Ma, F. (2024). Digital finance, financing constraints, and green technological innovation: A spatial analysis. *Global Finance Journal*, 61(100988), 100988. doi:10.1016/j.gfj.2024.100988
- Nasution, A. A., Ilham, I., Akbar, H., Huda, N., Wulandari, D., & Kudussisara, K. (2024). Obstacles to revitalizing communities coconut plantations to support the Green economy - based coconut industry in Indonesia: The case of simeulue island, Aceh province. *Universal Journal of Agricultural Research*, 12(1), 65–75. doi:10.13189/ujar.2024.120107
- Rois, C., Jannani, N., & Mufid, M. H. (2024). Islamic law paradigm responding conflicts of interest of economic development and ecological conservation hifdz al-bi'ah perspective. *AL-ISTINBATH Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 193. doi:10.29240/jhi.v9i1.8660
- Sabri, Aimon, H., & Amar, S. (2024). Economic growth and environmental degradation in Indonesia: The roles of investment, inflation, income inequality, fossil consumption, and poverty. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(5), 1941–1946. doi:10.18280/ijstdp.190532
- Shen, M., Ma, N., & Chen, Q. (2024). Has green finance policy promoted ecologically sustainable development under the constraints of government environmental attention? *Journal of Cleaner Production*, 450(141854), 141854. doi:10.1016/j.jclepro.2024.141854
- Stanković, S., Ilić, B., & Rabrenović, M. (2024). Using the composite EEPSE Green Economy Index to assess the progress of emerging economies in achieving the Sustainable Development Goals. *Problemy Ekorozwoju*, 19(1), 78–88. doi:10.35784/preko.5751
- Wu, T., Wen, L., & Yi, M. (2024). Balancing growth targets and environmental regulations: An empirical analysis of dual policy impact on corporate environmental responsibility-insights from China. *Journal of Environmental Management*, 355(120500), 120500. doi:10.1016/j.jenvman.2024.120500
- Zhang, W., Ke, J., Ding, Y., & Chen, S. (2024). Greening through finance: Green finance policies and firms' green investment. *Energy Economics*, 131(107401), 107401. doi:10.1016/j.eneco.2024.107401